



**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 33);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.110.120.881.090,89	
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp1.156.247.968.064,45</u>	
Surplus/(defisit)		Rp(46.127.086.973,56)
c. Pembiayaan :		
-Penerimaan Pembiayaan	Rp 147.677.052.131,59	
-Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp 101.549.965.158,03

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp33.195.999.912,32 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.143.316.881.003,21
  - b. Realisasi Rp 1.110.120.881.090,89  
Selisih lebih/(kurang) Rp 33.195.999.912,32
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp134.785.519.645,65 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 1.291.033.487.710,10
  - b. Realisasi Rp 1.156.247.968.064,45  
Selisih lebih/(kurang) Rp 134.785.519.645,65
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(101.589.519.733,33) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Surplus/defisit setelah Perubahan Rp (147.716.606.706,89)
  - b. Realisasi Rp (46.127.086.973,56)  
Selisih lebih/(kurang) Rp (101.589.519.733,33)
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 147.716.606.706,89
  - b. Realisasi Rp 147.677.052.131,59
  - c. Koreksi SiLPA Rp 39.554.575,30  
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00
  - b. Realisasi Rp 0,00  
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 147.716.606.706,89
  - b. Realisasi Rp 147.677.052.131,59
  - c. Koreksi SiLPA Rp 39.554.575,30  
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	147.716.606.706,89
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	147.677.052.130,98
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	101.549.965.158,03
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-lain	Rp	<u>(39.554.575,30)</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	101.549.965.158,03

#### **Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	6.036.380.906.144,78
b. Jumlah Kewajiban	Rp	105.684.687.813,29
c. Jumlah Ekuitas	Rp	5.930.696.218.331,49

#### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan-LO	Rp	1.206.485.122.042,77
b. Jumlah Beban	Rp	<u>1.693.067.157.413,45</u>
c. Jumlah Surplus/Defisit-LO	Rp	(486.582.035.370,68)

#### **Pasal 7**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas di BUD per 1 Januari 2018	Rp	147.361.980.908,32
b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp	146.321.030.779,98
c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi	Rp	(192.630.033.635,00)
d. Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan	Rp	0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	412.500,45)
f. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018	Rp	101.052.565.552,85
g. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2018	Rp	101.555.658.662,03

#### **Pasal 8**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas Awal	Rp	5.891.194.883.376,98
b. Jumlah Surplus/Defisit-LO	Rp	(486.582.035.370,68)

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp 526.083.370.325,20
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp 5.930.696.218.331,49

### **Pasal 9**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

## **Pasal 10**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;  
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;  
Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  
Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;  
Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpadauan Urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;  
Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;  
Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal dan (Investasi) Daerah;  
Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;  
Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;  
Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya;  
Lampiran I.10: Daftar Dana Cadangan Daerah ;  
Lampiran I.11: Daftar Pinjaman Daerah ; dan  
Lampiran I.12: Daftar Jumlah Pegawai Daerah Berdasarkan Golongan dan Jabatan
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **Pasal 11**

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**JOTAM L. SALLATA, SH., MM**  
Pembina TK.I / IV.b  
NIP. 19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 9 Agustus 2019

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 9 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**SYAFRIL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 3**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (39/4/2019)**

